

PENAJAMAN ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM PERSPEKTIF PENELITIAN SOSIOLOGI PERTANIAN DAN PEDESAAN

Tri Pranadji

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jalan A. Yani No. 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

Opinion of the experts in institutional and sociological fields are very important in agriculture and rural development policy settings. This paper describes conceptual framework of institution with respect to perspectives of agricultural and rural sociology research. Some aspects to institutional research to know further to accelerate agriculture and rural development are: *firstly*, institutional aspect is crucial in directing and accelerating planned social change especially in the agrarian rural community. *Secondly*, aspects of technology development and adoption, economic, social, law and political development, public infrastructure, agroecosystem and natural resources management are essential indicators to take into account. *Thirdly*, human resource competence, progressive value system, leadership, social structure and organization, social management, law and governance are institutional elements to assess more intensely.

Key words : *institutional analysis, social planned change, rural and agricultural development, competency of human resources, value system, leadership, social structure and organization*

ABSTRAK

Perumusan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan sangat memerlukan masukan dari para analis kelembagaan atau sosiologis. Tulisan ini menyajikan kerangka penganalisaan kelembagaan dalam perspektif penelitian sosiologi pertanian dan pedesaan. Berbagai aspek yang perlu dipahami dalam penelitian kelembagaan untuk mempercepat dan mempertajam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah: *pertama*, aspek kelembagaan sangat berperan penting dalam mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial yang direncanakan (*social planned change*), terutama pada masyarakat pedesaan yang masih sarat dengan peradaban agraris (*agrarian stage*). *Kedua*, aspek perkembangan dan adopsi teknologi, perkembangan ekonomi, sosial, hukum dan politik, pengelolaan infrastruktur publik, dan pengelolaan agroekosistem dan sumberdaya alam merupakan indikator yang harus dipertimbangkan secara serius dalam perubahan sosial yang direncanakan atau pembangunan pertanian dan pedesaan. *Ketiga*, komponen kelembagaan yang penting dikaji serius adalah kompetensi sumberdaya manusia, tata nilai maju, kepemimpinan, struktur dan organisasi sosial, manajemen sosial, dan hukum dan pemerintahan.

Kata kunci : *analisis kelembagaan, perubahan sosial yang direncanakan, pembangunan pertanian, pembangunan pedesaan, kompetensi sumberdaya manusia, tata nilai, kepemimpinan, struktur dan organisasi sosial*

PENDAHULUAN

Walaupun sudah hampir 2 dekade (sejak 1974) berdiri, kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dalam melakukan penelitian sosial atau kelembagaan masih relatif lemah. Kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan, yang seharusnya banyak mempertimbangkan aspek sosiologis atau kelembagaan, masih jauh dari gambaran ideal. Tulisan ini secara khusus

mengetengahkan bahasan aspek kelembagaan yang dapat digunakan peneliti sosial untuk mempertajam penganalisaannya dalam penelitian sosiologi pertanian dan pedesaan. Secara garis besar isi tulisan ini diarahkan juga untuk mengembangkan sebuah kerangka pemikiran yang dapat digunakan dalam penelitian kelembagaan oleh peneliti sosial pada umumnya.

Aspek kelembagaan yang dikemukakan dalam karya tulis ini ditempatkan sebagai peubah bebas (*independent variable*) atau

peubah penjelas yang menentukan keberhasilan pembangunan pertanian dan pedesaan (sebagai peubah tergantung atau *dependent variable*). Oleh sebab itu penulis menempatkan aspek kelembagaan dalam bingkai pembangunan atau perubahan sosial yang direncanakan (*intended social change*) dan evolusi sosial yang dipercepat (*accelerated evolution*). Terdapat kesejajaran antara pembangunan (yang diselenggarakan oleh negara) dengan perubahan dan evolusi sosial (Khalidun, 1976; Steward, 1961; Merton, 1962; dan Lauer, 1982). Perlu dikemukakan bahwa penelitian kelembagaan yang dimaksud haruslah dipandang sebagai bagian atau instrumen untuk memajukan atau memakmurkan masyarakat banyak, terutama masyarakat pertanian dan pedesaan. Penelitian adalah bagian dari upaya memajukan masyarakat, termasuk untuk membantu memecahkan masalah keterbelakangan multi dimensi pada masyarakat pertanian dan pedesaan yang hingga saat ini tak kunjung mendapat pemihakan secara wajar.

Akhir-akhir ini di kalangan peneliti maupun pejabat pemerintah semakin banyak ditemukan bahwa jika ada suatu fenomena sosial yang sulit mereka pahami maka langsung saja hal itu disebut sebagai “masalah kelembagaan”. Oleh sebab itu sangat mudah dimengerti jika banyak ditemukan “masalah kegagalan kelembagaan” pada hampir setiap kegiatan pembangunan, misalnya: kegagalan mengatasi kemiskinan, kegagalan mendorong energi lokal dalam penyebarluasan teknologi padi sawah, kegagalan mengembangkan masyarakat pertanian yang berdaya saing tinggi di pedesaan dan kawasan transmigrasi, serta kegagalan membendung “kemarahan petani” yang dirugikan akibat kebijakan subsidi pertanian. Mengemukakan begitu saja bahwa itu adalah masalah kelembagaan sudah barang tentu bisa dipahami. Hanya saja jika hal itu tidak diikuti dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek kelembagaan akan kurang mendatangkan implikasi positif bagi pembangunan masyarakat pertanian dan pedesaan.

Sejalan dengan keinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat pertanian dan pedesaan yang lebih maju, dewasa ini justru terasa adanya penurunan kesadaran di kalangan ilmuwan atau peneliti ilmu-ilmu sosial

terhadap penelitian di bidang *behavioral sciences* (mencakup ekonomi, politik, hukum dan pendidikan). Bidang ini, yang tercakup dalam rumpun penelitian sosial, seharusnya mendapat perhatian dan penanganan lebih serius. Banyak dijumpai pada saat peneliti sosial, misalnya seorang ahli ekonomi, menghadapi suatu “gejala aneh” terhadap “obyek sosial” yang diamati, tanpa berpikir panjang langsung saja gejala aneh tadi dianggap sebagai masalah kelembagaan. Sehingga di kalangan peneliti sosial bukan sosiologi terdapat kecenderungan bahwa yang aneh-aneh dan berbau “keranjang sampah” dianggap sebagai aspek kelembagaan. Penganalisaan berkaitan dengan aspek kelembagaan akan sangat baik jika didudukkan dalam kerangka keilmuan sosial secara lebih luas, yaitu dengan menempatkan (ilmu) sosiologi sebagai “*The King of Social Sciences*” (Rumusan Hasil Kongres dan Seminar Ikatan Sosiologi Indonesia, 2002).

Kerangka pemikiran kelembagaan dalam penelitian sosial (mencakup yang berkaitan dengan aplikasi sistem teknologi, ekonomi, pengelolaan infrastruktur publik, lingkungan dan sumberdaya alam, serta politik dan hukum) dapat digunakan untuk: *pertama*, melakukan identifikasi permasalahan atau diagnosa penyakit sosial yang sedang meluas, yang selanjutnya berdasar hal itu dapat dicarikan alternatif obat atau resep untuk penyembuhannya. *Kedua*, dapat digunakan untuk mengevaluasi secara komprehensif “apakah suatu program pembangunan telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan dan kemandirian masyarakat pertanian dan pedesaan?”. *Ketiga*, dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan peramalan atau prediksi terhadap kejadian-kejadian sosial (misalnya 5-10 tahun) mendatang berdasar atas gejala sosial yang teramati sekarang. Topik yang diuraikan dalam tulisan ini meliputi; penjelasan tentang penggunaan konsep perubahan sosial yang direncanakan (*social planned change*) untuk menganalisis pembangunan pertanian dan pedesaan, membahas ruang lingkup perubahan sosial atau pembangunan dalam analisis kelembagaan, dan menguraikan elemen-elemen kelembagaan yang diperkirakan akan berpengaruh besar terhadap kemajuan masyarakat pertanian dan pedesaan.

PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Secara apriori penelitian kelembagaan yang dimaksud dalam karya tulis ini diarahkan untuk menyetatkan pembangunan pertanian dan pedesaan. Berkaitan dengan itu, aspek kelembagaan secara sadar ditempatkan dalam bingkai perubahan sosial yang direncanakan (*social planned change*) atau pembangunan pertanian dan pedesaan. Aspek kelembagaan dapat ditempatkan sebagai “*means*” dalam rangka mewujudkan tujuan atau “*goals*” pembangunan pertanian dan pedesaan. Penganalisaan yang terkait dengan masalah kelembagaan, dengan demikian, haruslah dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Dalam penelitian kelembagaan istilah pembangunan sedikit banyak dapat dipertukarkan dengan perubahan sosial yang direncanakan atau diarahkan (*social planned or directed change*). Menurut Durkheim (1966) penelitian kemasyarakatan atau sosiologis dapat dipandang sebagai penelitian kelembagaan. Oleh sebab itu, penelitian kelembagaan pada masyarakat pertanian dan pedesaan harus menjadi bagian penting dari pembangunan pertanian dan pedesaan. Berkaitan dengan itu, perspektif perubahan sosial dapat digunakan untuk menganalisis peran aspek kelembagaan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.

Perubahan sosial merupakan bagian topik penelitian sosiologis yang relatif baru dan mengalami perkembangan yang relatif cepat setelah pertengahan abad 20, terutama setelah konsep negara bangsa (*nation state*) diterima sebagai kenyataan dan menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat. Dahulu pemahaman konsep kelembagaan atau lembaga (*institution*), misalnya sebagaimana dikemukakan Rivers (1926), cenderung menempatkan lembaga seperti yang terdapat pada masyarakat kecil, sederhana dan tertutup. Para antropolog sosial mempunyai kontribusi besar terhadap pemahaman konsep kelembagaan “versi” Rivers. Walaupun cara melihatnya relatif lebih holistik, kebanyakan penelitian antropologi sosial masih cenderung melihat masyarakat kecil sebagai konstruksi sosial yang stabil, mapan, (paling tidak mendekati) final dan “ideal”. Gambaran ini

seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat terbuka dan berubah relatif cepat, seperti yang terjadi pada jaman modern dewasa ini.

Pada pertengahan abad 20, teori sosiologi telah memasukkan perubahan sosial sebagai bagian penting pada puncak bahasannya. Pada saat yang bersamaan ilmu sosiologi semakin dituntut untuk tampil sebagai disiplin ilmu yang memiliki sumbangan signifikan terhadap kemajuan masyarakat, baik dalam skala dunia (“global”) maupun masyarakat kecil (misalnya desa atau dukuh). Walaupun tidak berjalan mulus, karena euforia “kehebatan kapitalisme” dalam memacu pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi tinggi hingga 1980-an, peran analisis sosial dalam kancah pembangunan masyarakat hanya mampu secara perlahan-lahan mendapat perhatian. Saat itu analisis sosiologis bisa membantu melihat secara kritis tentang kemungkinan munculnya “jalan buntu” akibat kegandrungan masyarakat dunia terhadap kehebatan perkembangan kapitalisme global (“*global capitalism*”) dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kritik serius dari kalangan ilmuwan sosial, khususnya dari kalangan ahli sosiologi, terhadap pendekatan pembangunan dalam 2-3 dekade terakhir adalah kemungkinan besar terjadi gejala kesenjangan sosial yang hebat dan kemiskinan massal pada masyarakat agraris dan pedesaan yang mengalami proses transisi ke arah industrialisasi. Timpanya tatanan masyarakat, yang dipicu oleh polarisasi kekuatan ekonomi yang beraliansi dengan kekuatan politik, menjadikan struktur sosial sangat kaku dan sangat tidak kondusif untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan. Bahkan keadaan ini sangat potensial mempertajam tingkat ketegangan sosial di kalangan kelompok masyarakat secara etnis, golongan ekonomi dan agama.

Tradisi demokrasi pada masyarakat tingkat bawah, terutama di tingkat dukuh (Tjondronegoro, 1977; Pranadji, 2002), sebenarnya cukup memberi peluang yang baik diselenggarakannya proses pembangunan pedesaan yang lebih elegan yang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Hanya saja, kaum elit politik dan perancang kebijakan pembangunan nasional kurang bisa menye-

lami, memahami dan menghargai kekuatan masyarakat lokal. Pembentukan kelembagaan demokrasi secara formal dari atas, dengan tidak mengakomodasi tradisi dan khasanah demokrasi di tingkat bawah, menjadikan praktek penyelenggaraan demokrasi dalam pembangunan pedesaan hanya sebagai kegiatan ritual politik formal dan hingga kini masih mengalami pendangkalan makna yang sangat besar. Dalam membahas peranan elit dan pembangunan (politik), Selingman (1989) terlalu “menyanjung” kehebatan kaum yang menanamkan tradisi demokrasi modern model masyarakat barat yang menunjukkan kemajuan budaya material yang relatif tinggi. Penulis beranggapan bahwa pendapat Selingman tersebut terlalu menyebelah, justru kaum elit hasil didikan baratlah yang tidak mampu menerjemahkan sistem demokrasi yang dikembangkan dari khasanah budaya masyarakat pertanian dan pedesaan di Indonesia.

Dalam Kata Pengantarnya di buku karangan Clifford Geertz (1983), yang berjudul “Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia”, Prof. Sajogyo menyatakan bahwa perkembangan masyarakat pertanian dan pedesaan di Indonesia, khusus pada masyarakat Jawa, mengalami ketidakjelasan arah. Artinya, pembangunan pertanian di pedesaan yang selama ini sebagian besar digerakkan melalui program pemerintah belum memberikan hasil yang menggembirakan, terutama dilihat dari tingkat pencapaian yang diukur dari peningkatan daya saing masyarakat pertanian dan pedesaan secara mandiri dan berkelanjutan. Penempatan fungsi kelembagaan dalam strategi pembangunan pertanian dan pedesaan selama ini dinilai masih belum tepat, sehingga bisa dimengerti jika pencapaian tujuan pembangunan tersebut belum sesuai harapan.

Selama ini program pembangunan pertanian diletakkan sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga apa yang distrategikan dalam pembangunan nasional harus tercermin dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Kegagalan pembangunan nasional, terutama dalam bentuk krisis multi dimensi seperti kita alami dewasa ini, sedikit banyak akan membawa imbas yang besar terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan. Hasil perubahan yang dirancang dan diakibatkan oleh program pembangunan

pertanian selama ini juga masih jauh dari yang diidealkan sejak awal. Oleh sebab itu, perubahan ke arah terwujudnya kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan tetap masih merupakan pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.

Ada anggapan yang belum sepenuhnya bisa terhapus dengan bersih, bahwa pembangunan menggambarkan suatu perubahan sosial yang terus menaik ke arah terbentuknya tatanan yang lebih baik. Anggapan ini baru bisa dibenarkan jika secara sistematis dapat dijelaskan cara-cara dan tahapan pencapaiannya yang bisa diterima secara keilmuan. Selama ini anggapan tersebut baru bisa dibenarkan pada tingkat keinginan atau cita-cita (“utopia”). Dengan kata lain, jika anggapan tadi dikategorikan sebagai tujuan ideal atau utopia tidaklah bisa disalahkan. Sebagai gambaran seseorang (misalnya) tidak bisa begitu saja menyalahkan keinginan masyarakat Jawa tentang harapan akan munculnya “Ratu Adil”. Utopia tentang “Ratu Adil”, seperti dikemukakan Kartodirdjo (1984), merupakan bagian dari reaksi budaya masyarakat pedesaan Jawa yang selama berabad-abad “tertindas”. Dengan utopia itu masyarakat Jawa bisa memelihara pandangan positifnya terhadap hari kemudian. Selain itu, masyarakat Jawa menjaga sikap optimisnya dalam memandang atau menghadapi masa depan yang lebih baik.

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa selama ini berkembang dua pandangan besar yang terkait dengan perubahan sosial (Wertheim, 1974) atau pembangunan pertanian dan pedesaan. Golongan pertama, yang menganut pandangan “struktural fungsional”, dimana perubahan masyarakat merupakan rangkaian titik keseimbangan dari tahapan evolusi sosial sebelumnya ke tahap evolusi berikutnya. Titik keseimbangan yang lebih mutakhir dipandang sebagai tahapan evolusi sosial yang lebih baik atau lebih tinggi dibanding tahap sebelumnya. Pandangan ini menganggap bahwa proses evolusi tadi berlangsung mengikuti pola garis lurus (linier) yang menaik, karena adanya anggapan bahwa dalam pencapaian setiap tahapan keadaan yang menggambarkan keseimbangan selalu terjaga oleh adanya harmonisasi dalam sistem masyarakat yang berubah tadi.

Golongan kedua biasa dikenal sebagai aliran yang menganut pandangan dialektis. Golongan ini memberikan pandangan yang sama sekali berbeda dibanding golongan sebelumnya. Tatanan masyarakat yang ideal atau seimbang adalah suatu sistem sosial yang mencerminkan tidak adanya perbedaan kelas sosial atau dikenal sebagai "*classless society*". Proses untuk mencapai tahap seimbang (sempurna) atau *classless society* tidak bisa dipandang sebagai hasil dari proses alamiah atau secara evolutif terbentuk dari titik keseimbangan satu ke titik keseimbangan berikutnya, sebagaimana dianut pandangan golongan pertama. Keseimbangan tersebut baru bisa terwujud melalui suatu perjuangan atau perlawanan dari kelompok masyarakat yang secara sadar merasa tertindas (massa) terhadap kelompok penindas (elit). Walaupun terkesan simplistik, namun hal demikian akan mendekati kenyataan jika di dalamnya dimasukkan peubah seorang pemimpin karismatik dan memiliki visi ke depan kuat.

Pemaknaan istilah pembangunan sudah terlalu lama secara sepihak dilakukan oleh para perancang dan pelaksana pembangunan, terutama dari kalangan aparat lembaga eksekutif atau birokrat pemerintah. Setiap rancangan atau pelaksanaan program pembangunan (termasuk di sektor pertanian dan pedesaan) dianggap sebagai bagian dari darma bakti (tugas suci) mereka untuk memajukan masyarakat pertanian dan pedesaan, mengikuti cara pandang golongan pertama. Istilah "tugas suci" tersebut cenderung merupakan penilaian atau pembenaran secara sepihak. Hal itu menjadikan setiap upaya peneliti untuk melakukan pengamatan dan penganalisaan secara kritis terhadap rancangan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian di lapangan sering mendapat hadangan dari aparat pemerintah setempat. Ini sekaligus bisa diartikan bahwa penegakkan hak kalangan tertindas untuk melakukan koreksi terhadap kelompok penindas telah dirampas secara sepihak oleh birokrat pemerintah masih belum memperoleh perhatian yang layak.

Pernyataan tentang "aparat atau birokrat pemerintah memihak siapa?" masih merupakan sesuatu yang masih sulit didudukan secara jelas. Menurut McKenzie dan Tullock (1978), aparat atau birokrat pemerintah

bisa dipandang sebagai mahluk rasional. Mereka ini adalah memiliki kecenderungan untuk mendapat keuntungan berlebih dari pekerjaannya. Jika dalam menjalankan pekerjaannya mereka ini tidak dikontrol secara kelembagaan oleh aparat (terutama) dari kalangan legislatif, atau memiliki kontrol moral yang kuat, mereka ini bukan saja akan melakukan upaya memperoleh pendapatan di atas yang seharusnya (misalnya dengan melakukan praktek korupsi), namun juga akan malas bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa walaupun ingin sekali memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, para birokrat pemerintah tidak suka bekerja keras. Suatu kecenderungan historis bahwa aparat atau birokrat pemerintah umumnya merasa serba kuasa atas masyarakat atau rakyat. Dalam menjalankan tugasnya mereka membutuhkan kepatuhan dan kesetiaan masyarakat, seakan-akan mereka turunan para "Dewa" (Koschmann, 1995), namun mereka tidak merasa berkewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat atau menerima masukan kritis dari para intelektual atau peneliti sosial.

RUANG LINGKUP PERUBAHAN SOSIAL

Tingkat penganalisaan perubahan sosial mencakup sejak perubahan terjadi pada tingkat individu, pola interaksi antar pelaku sosial, komunitas kecil, sistem masyarakat dan peradabannya (Lauer, 1982). Baik karena terbentuk secara alamiah ataupun sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu, lembaga mempunyai peran sangat strategis dalam perubahan sosial. Di muka juga telah dikemukakan bahwa, sebagai peubah penjelas, aspek kelembagaan menjadi faktor penentu atau *prime mover* keberhasilan pembangunan pertanian dan pedesaan. Ruang lingkup penelitian kelembagaan, dengan demikian, haruslah diacukan pada indikator keberhasilan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Di kalangan ahli sosiologi ataupun ekonomi klasik, menempatkan kelembagaan sebagai penggerak atau penghela pembangunan atau perubahan sosial sudah dianggap hal yang biasa. Pemerintah suatu negara dan jaringan organisasi beserta sistem kerjanya adalah lembaga. Fungsi lembaga-

an pemerintah antara lain adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan agar kesejahteraan masyarakat suatu negara terpenuhi. Dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya Departemen Pertanian, seharusnya juga demikian. Kegagalan suatu lembaga pemerintah, seperti Departemen Pertanian, antara lain bisa diukur dari kegagalannya dalam membantu masyarakat pertanian di pedesaan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui pengembangan usaha pertanian.

Peran lembaga atau kelembagaan dalam perubahan sosial berkaitan erat dengan pencapaian kegiatan pembangunan, termasuk yang dijalankan oleh Departemen Pertanian. Rentang waktu untuk melihat hasil dari perubahan kelembagaan umumnya relatif lebih lama dibanding dengan rentang waktu yang dibutuhkan pada perubahan psikologis di tingkat individu atau kesadaran kelompok kecil petani. Dengan menggunakan kerangka perubahan sosial, seperti dikemukakan Maclver (1962), dan pembangunan pedesaan, seperti dikemukakan Inayatullah (1979), dapat dibuat ramuan ruang lingkup penelitian kelembagaan seperti diuraikan di bawah.

Perkembangan dan Adopsi Teknologi

Perkembangan atau inovasi di bidang teknologi merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang berkembang ke arah yang lebih maju. Dari waktu ke waktu perkembangan teknologi hampir selalu menunjukkan gejala meningkat secara garis lurus (Maclver dan Page, 1962). Jika dijumpai sekumpulan fakta di lapangan atau pada sekumpulan petani menunjukkan gejala sebaliknya, maka sistem kelembagaan yang mendukung pengembangan teknologi (misalnya: penerapan penggunaan varietas padi unggul di lahan irigasi) bisa dikatakan tidak berjalan normal. Artinya, cara kerja sistem kelembagaan itu yang harus dicermati, bukan teknologinya. Sering terjadi, pada saat pengembangan teknologi di masyarakat petani mengalami kegagalan, yang disalahkan adalah petaninya. Kemungkinan melihat bahwa yang salah adalah cara kerja aparat atau kemampuan aparat dalam melakukan pendekatan pada petani masih belum lazim dijadikan objek penelitian.

Penelitian kelembagaan yang dikaitkan dengan pengembangan dan diseminasi teknologi umumnya terkait dengan upaya peningkatan produktivitas dan produksi secara agregat, misalnya peningkatan produksi padi nasional. Namun tetap perlu diingat bahwa penelitian semacam ini hanya membahas salah satu aspek saja dari sekian aspek yang terkait dengan kelembagaan. Akan berbeda jika cara pandang analisis kelembagaan diterapkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Sangat tidak dianjurkan seorang peneliti secara semena-mena, pada saat melihat ketepatan kelembagaan teknologi, langsung saja menggunakannya untuk kegiatan ekonominya.

Perkembangan Ekonomi

Berbeda dengan perkembangan dan adopsi teknologi, bentuk umum perubahan sosial yang digambarkan dalam perkembangan ekonomi cenderung fluktuatif. Sekalipun demikian, kecenderungan perkembangannya bisa menunjukkan gejala menaik atau menurun. Walaupun setiap titik perubahan kegiatan ekonomi tidak selalu menunjukkan garis lurus (menaik), namun penganut mazhab pertumbuhan ekonomi (*growth maniac*), yang mendominasi peradaban berpikir kalangan ekonom neo-klasik, memaksakan kehendak agar setiap perubahan menunjukkan gejala meningkat. Gejala ini bisa diamati pada tingkah laku para pakar di kalangan Ekuin pada 1-2 dekade lalu, yang “senang” menunjukkan keberhasilan dalam pemacuan pertumbuhan ekonomi dan besarnya jumlah hutang negara yang dapat diraih. Disadari atau tidak jebakan pembangunan dengan model pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dianut oleh Rostow (1960), sangat diminati ahli ekonomi pembangunan yang mengendalikan pembangunan nasional 2-3 dekade lalu.

Sangat disayangkan para pakar pertanian lulusan Amerika, termasuk ekonomi pertanian di Indonesia saat itu belum mampu memberikan gambaran yang membumi bahwa masa depan perekonomian Indonesia sangat tergantung pada seberapa jauh sektor pertanian bisa diandalkan sebagai tulang punggung (*back bone*) perekonomian nasional. Gambaran ini sekaligus menunjukkan adanya bentuk “pemaksaan kehendak” agar para

stake holders pembangunan pertanian dan pedesaan, di luar kalangan Ekuin, menjadi kelompok pengekor dan pendukung setia kebijaksanaan para pakar Ekuin. Pada tahap awal pembangunan masa Orde Baru, model pertumbuhan ekonomi ini secara sepintas memang menunjukkan keberhasilan, walaupun saat itu para pakar sosiologi dan ekonomi berkeadilan sosial sudah memperingatkan kerapuhannya.

Pertanyaan yang menarik dikemukakan mengapa kecenderungan perkembangan ekonomi, termasuk usahatani padi sawah, yang terus menerus menunjukkan gejala meningkat tadi tidak berlaku begitu menginjak akhir tahun 1990-an?. Pertanyaan yang lebih ekstrim: mengapa secara tiba-tiba memasuki akhir 1990-an perkonomian Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat?. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa suatu keadaan yang terus-menerus menunjukkan gejala meningkat di bidang ekonomi belum berarti hal itu akan seterusnya begitu. Untuk memperoleh jawaban yang relatif akurat perlu dilihat elemen-elemen kelembagaan apa yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi? Termasuk juga memahami bagaimana proses elemen kelembagaan mempengaruhi perkembangan ekonomi?. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh banyaknya input produksi dari luar (impor) dan didanai dari pinjaman asing sangat rawan bagi perekonomian nasional. Ekonomi yang demikian tidak mencerminkan kekuatan riil masyarakat yang mendukungnya.

Ruang lingkup perubahan sosial yang bisa dilihat dari sudut pandang perkembangan ekonomi biasanya perlu dibatasi pada penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber pendapatan rumah tangga, cara melakukan akumulasi kapital dan aset strategis (misalnya tanah). Aspek perubahan yang perlu dilihat adalah perkembangannya dari waktu ke waktu. Berbeda dengan pengembangan teknologi, titik antar waktu yang dijadikan referensi untuk menunjukkan adanya perubahan perlu lebih lama. Penggunaan titik antar waktu yang terlalu pendek mungkin cocok untuk pengembangan teknologi, namun akan sangat "berbahaya" jika diterapkan untuk menafsirkan gejala perkembangan ekonomi. Berdasar kejadian yang terlihat dalam 1-2 dekade lalu, dapat ditunjukkan adanya peningkatan produk-

si atau produktivitas padi agregat (nasional), namun ternyata hal itu tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan (riil) usahatani. Bahkan ada selang atau penggalan waktu tertentu perkembangan pendapatan usahatani menunjukkan gejala penurunan.

Perkembangan Sosial

Pencapaian tujuan sosial dalam pembangunan pertanian dan pedesaan merupakan salah satu bagian penting hasil dari perubahan sosial yang direncanakan. Kalangan ilmuwan sosial domestik, seperti Sajogyo, Tjondronegoro dan Mubyarto sangat tegas menyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah pencapaian pemerataan dan keadilan sosial. Pemikir luar, seperti Kotter (1988), juga menilai bahwa terdapat inkonsistensi antara gagasan ideal pembangunan pertanian dan pedesaan dan strategi pelaksanaannya yang sudah menjadi "lagu lama" yang terus diulang di setiap seminar atau konferensi ilmiah. Di satu sisi, memberantas kemiskinan dan pengangguran merupakan tujuan ideal pembangunan; namun di sisi lain kebijaksanaan pembangunan ekonomi hampir selalu memihak industri dan masyarakat perkotaan. Oleh sebab itu, ruang lingkup perubahan sosial antara lain mencakup pengurangan kesenjangan lapangan kerja, peluang berusaha, pemerataan perolehan pendapatan antar golongan masyarakat (terutama lapisan masyarakat terbanyak), jaminan memperoleh kecukupan kebutuhan dasar atau *basic need* (misal: bahan pangan), dan mobilitas sosial (terutama mobilitas vertikal) harus menjadi bagian penting strategi dasar pembangunan pertanian dan pedesaan.

Perkembangan sosial ini bisa untuk mengukur sampai seberapa jauh peranan pengembangan teknologi dan ekonomi memberikan manfaat pada masyarakat banyak. Bisa jadi teknologi tinggi dan kapital secara agregat bisa dikuasai oleh keseluruhan sistem sosial, namun manfaatnya tidak sampai dirasakan hingga lapisan masyarakat yang berjumlah banyak di bagian bawah. Perkembangan sosial tidak selalu mengikuti pola perkembangan teknologi dan ekonomi. Bahkan yang terjadi bisa berlawanan dengan pola perkembangan teknologi dan ekonomi. Dilihat dari perkembangan kesempatan kerja, seba-

gaimana dikemukakan Rahardjo (1990), transformasi pertanian dengan strategi industrialisasi tidak memberikan gambaran yang cerah. Industrialisasi pertanian cenderung “menghabisi” pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, termasuk nelayan kecil. Di luar sektor perminyakan, hanya buruh tekstil yang tampak kontras bisa dijadikan “sapi perah” ekspor non-migas saat itu.

Sajogyo (1974) pada seminar FAO di Roma menyatakan bahwa dari keseluruhan petani yang terlibat program intensifikasi padi sawah, golongan petani kaya yang relatif lebih banyak merasakan manfaat teknologi intensifikasi padi sawah berbasis varitas unggul dan lahan irigasi. Industrialisasi yang cepat di Eropa Barat pada awal abad 18 (Polanyi, 1957) juga hanya dinikmati oleh kaum elit pemodal. Industrialisasi yang cepat tadi menyebabkan kesenjangan sosial dan kemiskinan yang gawat. Tampaknya apa yang terjadi Indonesia pada 1-2 dekade terakhir juga demikian, di mana industrialisasi yang digerakkan oleh dana pinjaman luar negeri justru menyebabkan tidak tanggunya ekonomi nasional menghadapi krisis. Pada saat yang hampir bersamaan perkembangan kesejahteraan sosial menjadi lebih terpuruk. Industri di kota di satu sisi memang menunjukkan perkembangan yang relatif pesat, akan tetapi di sisi lain jumlah orang miskin makin banyak dan kesenjangan sosial makin besar.

Perkembangan Hukum dan Politik

Hampir secara telanjang tampak bahwa aspek hukum dan politik dewasa ini menunjukkan titik lemah yang memprihatinkan. Wajarlah jika dikatakan bahwa aspek hukum dan politik saat ini sedang menjadi sorotan tajam. Dua aspek ini menjadikan proses perubahan sosial di Indonesia mengalami ganjalan sangat serius. Dari kalangan dunia internasional Indonesia dianggap negara sarang teroris dan negara yang tidak aman untuk investasi. Indonesia termasuk salah satu negara dengan sistem birokrasi yang sangat korup. Penyelenggaraan hukum tidak mampu memberantas korupsi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat bisnis, baik dari manca negara maupun dalam negeri, terhadap Indonesia sangat rendah. Perkembangan hukum, baik

adat maupun nasional, seolah-olah masih jalan di tempat dan bahkan terdapat kecenderungan semakin mundur.

Dilihat dari permukaan, penyelenggaraan politik di Indonesia akhir-akhir ini di permukaan tampak semarak. Namun demikian, iklim politik Indonesia masih belum menunjukkan gejala yang sehat. Praktek penggunaan uang (*money politic*) secara tidak wajar untuk melancarkan tujuan politik atau kepentingan askriptif lainnya masih banyak mewarnai kegiatan perpolitikan baik di jalanan maupun di gedung Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat dan daerah. Selama kelembagaan politik Indonesia belum menunjukkan gambaran yang cukup matang, maka perannya dalam mendorong kemajuan masyarakat pertanian dan pedesaan tidak akan dapat diandalkan. Kelembagaan politik yang ada masih banyak memihak kepentingan golongan industri di perkotaan dan pihak yang mempunyai banyak uang. Perkembangan kelembagaan politik, termasuk penyelenggaraan otonomi daerah, hingga dewasa ini belum menunjukkan dampak yang berarti bagi masyarakat banyak. Dari beberapa fakta di lapangan, misal di Lampung dan Bengkulu, justru memberikan gambaran yang lebih buruk dibanding rezim pemerintahan sebelumnya.

Beberapa aspek hukum dan politik yang penting dianalisis dari sudut kelembagaan adalah kepastian dan perlindungan hukum, distribusi otoritas, praktek penggunaan kekuasaan, pembatasan praktek monopoli, sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kepercayaan publik yang baik. Aspek hukum yang mampu memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat banyak harus dikedepankan. Hal ini bukan saja akan memberikan landasan kepastian bagi pelaku ekonomi setempat namun juga memberikan citra bagi pelaku ekonomi luar bahwa masyarakat Indonesia mampu memberikan perlindungan dan kepercayaan bagi pelaku-pelaku ekonomi yang menjunjung tinggi praktek bisnis yang bersih. Sistem politik yang kurang mencerminkan akuntabilitas dan representasi yang jelas bagi kepentingan masyarakat banyak juga perlu dilakukan perbaikan dengan menerapkan sistem manajemen pengambilan keputusan yang lebih sehat.

Perkembangan Pengelolaan Infrastruktur Publik

Pengelolaan infrastruktur publik merupakan salah satu bagian penting penelitian kelembagaan. Jika infrastruktur publik hingga tingkat desa dan unit kecil komunitas pedesaan dapat dikelola dengan baik, kegiatan pembangunan pertanian dan pedesaan akan dapat memberikan peluang besar bagi terwujudnya daya saing sistem sosial pertanian yang berbasis usaha pertanian, pembangunan pertanian dan pedesaan aspek kelembagaan. Perubahan yang terkait dengan ini tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan pengembangan teknologi. Sebaliknya dengan pengelolaan infrastruktur publik yang baik, kelembagaan yang dikembangkan untuk mendukung diseminasi teknologi akan lebih berfungsi dan akan memberikan dampak besar bagi kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dari pengamatan langsung di lapangan di berbagai pelosok Indonesia, pengelolaan infrastruktur publik di tingkat desa masih jauh dari memadai. Hal itu bukan saja kurang mencukupi untuk pemacuan kemandirian perekonomian pedesaan, namun juga untuk aktivitas sosial lain yang berimplikasi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pengelolaan (prasarana) pasar, industri, transportasi, telekomunikasi, energi listrik dan bahan bakar, pendidikan, keagamaan dan sanitasi belum banyak menyentuh masyarakat pertanian dan pedesaan secara signifikan. Daya saing perekonomian pertanian dan pedesaan sulit diharapkan bisa berkembang secara sehat, terutama dikaitkan dengan globalisasi pasar, jika pengelolaan infrastruktur publik masih dipusatkan di perkotaan dan tidak menyentuh perekonomian dan kehidupan masyarakat pedesaan secara langsung.

Perkembangan Pengelolaan Agroekosistem dan Sumberdaya Alam

Perubahan sosial yang menyentuh aspek pengelolaan agroekosistem dan sumberdaya alam setempat (lokal) akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan kegiatan pembangunan pertanian dan pedesaan secara

lintas generasi. Dewasa ini, akibat pemacuan pertumbuhan ekonomi yang berlebihan, agro-ekosistem dan sumberdaya alam di pedesaan mengalami ancaman serius. Pada 1930-an seorang peneliti ekosistem pertanian dan pedesaan bernama Thsijsse (1982) mengatakan bahwa Pulau Jawa terancam menjadi padang pasir.

Kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam dalam bentuk penggundulan hutan, penjarahaan lahan *catchment area* (resapan air) untuk pengembangan perumahan pribadi dan bangunan publik yang tidak dapat dikontrol masyarakat lokal maupun negara menjadikan pembangunan pertanian dan pedesaan semakin terpojok ke arah yang tidak menentu dan menuju kegagalan. Selain itu, kesulitan air yang amat serius di perkotaan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan, merupakan indikasi tidak tegaknya tatanan kelembagaan yang mengatur sumberdaya milik bersama. *Tragedy of the common*, misalnya dalam bentuk bencana banjir, merupakan salah satu bentuk kegagalan pengembangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan agroekosistem dan sumberdaya alam.

Pengembangan kelembagaan yang menghasilkan jaminan keamanan untuk pencapaian keberlanjutan daya dukung sumberdaya alam untuk menunjang aktivitas kehidupan (*Marginal Sustainability Yield=MSY*; MSY untuk keamanan pangan, sosial, politik, ekonomi, keamanan dan kenyamanan hidup), biodiversitas, pencemaran (udara, air dan terestrial), dan pengelolaan ekosistem dan pengendalian bencana alam (banjir, kebakaran, ledakan hama dan penyakit) merupakan bagian penting pembangunan pertanian dan pedesaan. Hingga kini masih tampak mengherankan bahwa aspek ini tidak secara serius dijadikan faktor penjelas kegagalan pembangunan pertanian dan pedesaan. Dengan gambaran ini, disadari atau tidak, kita telah merampas hak dan menimpakan bencana besar bagi kehidupan generasi mendatang karena "kebodohan" kita. Hingga saat ini kita hampir tidak memiliki kekuatan kelembagaan yang bisa mencegah pengrusakan pada sumberdaya alam dan lingkungan ini secara efektif.

ELEMEN KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN

Hampir setiap pakar sosial cenderung memiliki semacam “preferensi” sendiri dalam memberi makna lembaga. Sebagai contoh, Uphoff (1986) dan Tjondronegoro (1977) cenderung menyempitkan pemaknaan lembaga dalam kaitan perbedaannya dengan organisasi. Tjondronegoro cenderung menempatkan pemaknaan lembaga dengan pendekatan ciri kemajuan masyarakat. Uphoff (1986) menarik pengertian lembaga atau kelembagaan dalam konteks struktur dan keorganisasian untuk pengembangan masyarakat lokal di bidang ekonomi, tanpa ada pemihakan yang disandarkan pada maju atau tidaknya masyarakat yang dilihat. Tjondronegoro (1977) juga bertolak pada adanya perbedaan yang mendasar antara lembaga dan organisasi. Ia juga ingin menonjolkan bahwa makna lembaga lebih mencerminkan keteraturan pada masyarakat kecil yang masih tradisional (setingkat dukuh ke bawah) dan organisasi mencerminkan keteraturan pada masyarakat modern (desa ke atas).

Pembelahan masyarakat tradisional mencerminkan keteraturan yang didasarkan atas lembaga di satu sisi, dan masyarakat modern mencerminkan keteraturan yang didasarkan atas organisasi di sisi lain tidaklah memberikan gambaran yang memadai untuk menganalisis masalah pembangunan pertanian dan pedesaan. Penganalisaan kelembagaan untuk melihat sampai seberapa jauh kemajuan pertanian dan pedesaan bisa dicapai tidak cukup jika semata-mata hanya dilihat dari elemen keorganisasian sosialnya. Melihat dari “bentuk luar”-nya, misal: struktur organisasinya saja jauh dari cukup. Dengan memperhatikan juga “isi”-nya, atau “makna dalam”-nya (Lauer, 1982), akan sangat membantu memberikan penilaian apakah suatu sistem masyarakat dapat maju atau tidak. Dalam bab ini dijelaskan tentang sejumlah elemen yang tercakup dalam makna atau istilah kelembagaan yang menentukan kemajuan pembangunan pertanian dan pedesaan seperti diuraikan berikut.

Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM merupakan salah satu komponen kelembagaan yang penting dan sangat menentukan kemajuan pertanian dan pedesaan. Agar kemajuan pertanian dan pedesaan bisa dicapai, idealnya semua SDM, dari petani hingga aparat pemerintahnya, yang terlibat dalam kehidupan dan pengembangan masyarakat pertanian dan pedesaan, haruslah memiliki kompetensi yang memadai. Komponen kompetensi yang dimaksud mencakup:

- (a) Keterampilan yang cukup pada individu, hal ini penting untuk peningkatan produktivitas individu dalam suatu bidang pekerjaan. Keterampilan individu menjadi salah satu ciri penting perkembangan kemajuan masyarakat pertanian dan pedesaan.
- (b) Kematangan emosional yang tinggi, hal ini penting untuk membangun hubungan yang bersifat “*mutual respect*”. Hubungan “*interpersonal trust*” sebagai landasan kerja kolektif haruslah didasarkan pada individu yang telah memiliki kematangan emosional relatif tinggi.
- (c) Kemampuan bekerjasama yang bersifat mutualistik, harus dipandang sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan produktivitas kerja individu melalui cara kerja yang terorganisasi dengan baik.
- (d) Apresiasi terhadap tata-nilai maju. Hal ini paling tidak akan menghalangi timbulnya resistensi individu atau anggota masyarakat terhadap kebutuhan untuk maju bersama.
- (e) Apresiasi tinggi terhadap penggunaan ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan keorganisasian sosial yang progresif.
- (f) Responsif terhadap kepemimpinan futuristik. Hal ini memberikan peluang hadirnya sosok pemimpin yang memandu masyarakat untuk lebih cepat maju secara lebih terarah.

Tata Nilai Maju

Kandungan tata nilai yang ada dalam individu atau sistem sosial akan sangat menentukan sampai seberapa jauh tingkat

kemajuan individu atau sistem sosial tersebut. Tata nilai yang dijalankan suatu sistem sosial umumnya telah mengalami pematangan yang relatif lama, bisa memakan waktu lebih dari seabad. Beberapa komponen tata nilai di bawah ini bisa untuk mengidentifikasi dan menentukan gambaran kemajuan yang akan dicapai suatu masyarakat, baik dalam tingkat kelompok tani, desa maupun negara, yaitu : penghargaan terhadap kerja keras (tidak lembek), rajin (tidak malas), hemat (tidak menghabiskan aset staregis), produktif (tidak konsumtif), rasa malu dan harga diri tinggi (tidak *rai gedheg*), prestasi-kompetitif (*achievement orientation* atau tidak askriptif), sabar dan rendah hati (tidak pamer), haus inovasi (tidak resisten terhadap inovasi), cara kerja/berpikir sistematis dan terorganisir (tidak acak dan semrawut), daya empati tinggi (tidak masa bodoh), rasional dan impersonal (tidak seenaknya dan mengikuti selera pribadi), dan bervisi jangka panjang yang jelas.

Sebagai gambaran, masyarakat Jepang memiliki energi kemajuan yang besar karena memiliki rasa malu dan harga diri yang tinggi, kerja keras, rajin dan ingin memenangkan setiap kompetisi atau pertarungan di arena pasar terbuka. Weber (1964) menyatakan bahwa kemajuan masyarakat Eropa pada abad 16-17 didorong suntikan Etika Protestan (*Protestant Ethics*) yang memandang kerja adalah "amal-ibadah" yang wajib bagi manusia yang dianugerahi kehidupan.

Kepemimpinan

Dalam perspektif pembangunan atau perubahan sosial, Ponsioen (1969) menyebutkan bahwa aspek kepemimpinan sangat menentukan kemajuan masyarakat (*leadership as a prime mover*), dan aspek tersebut termasuk bagian penting dari lembaga. Ada beberapa jenis tipe kepemimpinan, misalnya kepemimpinan karismatik (Weber, 1964). Kepemimpinan yang dibahas di sini bukan menekankan pada tipe kepemimpinannya, melainkan komponen apa saja yang menentukan suatu kepemimpinan bisa dinilai memiliki kandungan untuk memajukan masyarakat pertanian dan pedesaan. Komponen kepemimpinan yang dimaksud adalah:

- (a) Integritas personal yang tinggi (terpercaya, jujur dan adil) yang melekat pada pribadi seorang pemimpin yang sedang menjalankan kepemimpinannya.
- (b) Visi ke depan yang jelas dan implementatif yang dipunyai seorang pemimpin.
- (c) Kemampuan seorang pemimpin memberi inspirasi (*inspiring*) dan mengarahkan (*directing*) anggota masyarakat yang dipimpinnya.
- (d) Memiliki kemampuan untuk mengabdikan atau bersifat altruistik pada masyarakat yang dipimpinnya. Pengertian altruistik ini bisa dikaitkan adanya "investasi kepercayaan", yang dengan kepercayaan itu seorang pemimpin bisa mengajak masyarakat untuk melakukan prediksi terhadap kebutuhan ke depan dan upaya untuk mencapainya.
- (e) Mempunyai keunggulan atau keistimewaan diri (spesifik) yang signifikan dan sangat interaktif dengan kebutuhan masyarakat.
- (f) Memiliki kemampuan dalam pemecahan konflik (*conflict resolution*) yang terjadi di masyarakat dan menggalang kebersamaan (*solidarity maker*) secara sukarela untuk mencapai *win-win solution*.
- (g) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anggota masyarakat yang dipimpinnya.
- (h) Mengajarkan penggunaan rasionalitas yang tinggi pada setiap pengambilan keputusan.
- (i) Menjunjung tinggi kewajiban untuk menegakkan sistem kerja kolektif dan mokratik terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa seberapa jauh pengaruh faktor kepemimpinan dalam memajukan masyarakat berkaitan erat dengan kandungan komponen kepemimpinan yang terdapat pada diri seorang pemimpin. Dengan menggunakan komponen tersebut kita juga dapat melakukan penilaian seberapa jauh seorang pemimpin dapat menjadi penentu kemajuan masyarakat pertanian dan pedesaan. Dengan bantuan komponen kepemimpinan dapat dilakukan penganalisaan yang relatif tajam dan sekaligus

melakukan peramalan (*prediction*) seberapa jauh masyarakat akan menjalankan dan menunjukkan kesetiannya terhadap diri seorang pemimpin.

Struktur dan Organisasi Sosial

Salah satu kritik serius dalam modernisasi pertanian atau pembangunan yang dilandaskan pada paradigma pemikiran barat ("westernisasi") adalah kurang menekankan pada perubahan struktur sosial. Salah satu cara untuk melihat perubahan struktur sosial adalah dengan memperhatikan perubahan struktur lapisan dan sistem interdependensi yang terjadi pada hubungan antar pelaku dan sekumpulan pelaku sosial yang terbentuk. Struktur sosial yang sehat dicerminkan oleh adanya sistem pembagian kerja yang bersifat (solidaritas) organik yang sehat, sebagaimana digambarkan Durkheim (1933).

Struktur sosial sehat adalah cerminan dari diferensiasi dan spesialisasi pekerjaan yang sehat. Selanjutnya adalah apakah struktur sosial yang terbentuk di pertanian dan pedesaan disandarkan atas diferensiasi dan spesialisasi pekerjaan? Apakah sistem interdependensi yang terbentuk mencerminkan asimetrisasi yang ekstrim? Jika ya, hal itu mencerminkan struktur masyarakat yang timpang dan tidak produktif. Struktur sosial yang demikian umumnya memuat aspek diskriminasi ekonomi atau kelas (pemilikan dan penguasaan aset produksi dan aset berharga lainnya), kekuatan "askriptif" (misalnya: jabatan politik, struktur birokrasi kerja, pertimbangan gender, keindahan tubuh dan keahlian khusus) dan derajat sosial atau *social dignity* (misalnya berdasar status hubungan perkawinan, keturunan, golongan suku atau ras tertentu, gelar dan penghargaan masyarakat).

Organisasi sosial bisa didekati dengan memperhatikan sistem kemitraan dan keterlibatan (*compliance*) masyarakat untuk tujuan di bidang pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan, penguatan identitas individu dan sosial, pengelolaan otoritas publik (pemerintahan), pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sistem pemeliharaan keteraturan sosial ("*pattern maintenance*") yang telah terbentuk. Keorganisasian sosial bisa

dilihat dari jaringan sistem interdependensi antar anggota masyarakat. Idealnya, jaringan sistem interdependensi (termasuk di bidang ekonomi) mencerminkan sistem pertukaran yang simetris. Organisasi sosial atau ekonomi yang tidak sehat memperlihatkan interdependensi asimetris yang relatif ekstrim. Keadaan ini bukan saja menggambarkan ketegangan atau potensi konflik yang tinggi dalam masyarakat, namun juga sangat berpeluang mendatangkan bencana kolektif atau kehancuran bersama, misalnya dalam bentuk krisis multi dimensi seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Manajemen Sosial

Manajemen sosial terkait erat dengan sistem pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Dalam bentuk pertanyaan, beberapa komponen penting dalam manajemen sosial yang menentukan kemajuan masyarakat dapat diuraikan seperti berikut:

- (a) Apakah pengambilan keputusan bersama menerapkan prinsip transparansi dalam bentuk kejelasan informasi dan argumentasi yang digunakan?
- (b) Apakah asas akuntabilitas, dalam bentuk bisa dipertanggungjawabkan, diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan bersama?
- (c) Apakah keputusan yang diambil mengikuti asas rasionalitas yang jelas?
- (d) Apakah pengambilan keputusan merepresentasi kepentingan bersama dan dilakukan secara demokratis?
- (e) Apakah setiap keputusan yang diambil dapat dilakukan koreksi (diaudit secara terbuka) disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategisnya?

Hukum dan Pemerintahan

Aspek hukum dapat ditelusuri dari konsistensi antara norma ideal yang dirumuskan dalam bentuk aturan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komponen hukum yang penting dikemukakan adalah: kepastian pengakuan terhadap kepemilikan dan penguasaan atas barang atau

identitas suatu produk. Dengan kepastian tersebut seorang pelaku agribisnis atau pelaku sosial akan memiliki keyakinan terhadap apa yang diusahakannya, dalam kaitan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Aspek hukum lain yang tidak bisa diabaikan adalah pembatasan praktek monopoli (agar keadilan, sesuai amanat UUD 1945, sosial lebih diutamakan dari pada pemanjaan kepentingan individu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya), aturan main khusus (misal: aturan memasukkan produk dan investasi dari luar), dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Aspek pemerintahan ditekankan pada pengaturan yang mengarahkan pada peningkatan kreativitas dan peran masyarakat agar tercapai tujuan kesejahteraan bersama. Hal penting yang perlu dikedepankan adalah perlunya ditegakkannya sistem pengelolaan kadaulatan dan kepercayaan masyarakat atau *public trust*, misalnya melalui perancangan dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum ini masyarakat tidak secara apriori menolak praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat monolitik dan sentralistik. Hanya saja, penyelenggaraan pemerintahan secara sentralistik beberapa dekade lalu tidak memberikan garansi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga dirasakan ada desakan serius untuk melakukan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat II (setingkat kabupaten). Pertanyaannya adalah: "Sampai seberapa jauh kedaulatan masyarakat (pedesaan) masih menjadi fokus perhatian elit pemerintah dan politisi di daerah tingkat II?".

PENUTUP DAN IMPLIKASI PENELITIAN KE DEPAN

Hingga kini, penelitian sosiologis atau kelembagaan yang terkait dengan pembangunan pertanian dan pedesaan relatif masih lemah dan terkesan seadanya saja. Jika dilakukan secara lebih serius dan komprehensif, pengembangan analisis kelembagaan dalam penelitian sosial ekonomi akan mempunyai implikasi besar terhadap keberhasilan pembangunan pertanian dan pedesaan di masa datang. Namun, di samping masih

lemahnya tenaga peneliti di bidang ini, masih sangat disayangkan bahwa pemahaman perancang dan pelaksana pembangunan pertanian dan pedesaan terhadap pentingnya aspek kelembagaan masih sangat rendah.

Dalam kenyataan penganalisaan kelembagaan belum banyak menyentuh substansi yang berimplikasi besar terhadap kemajuan masyarakat pertanian dan pedesaan. Aspek kelembagaan, misalnya menyangkut pengembangan tata nilai, kepemimpinan dan perubahan struktur sosial, masih jarang diteliti secara mendalam. Akibatnya, implikasi penelitian kelembagaan yang selama ini diusulkan tidak lebih dari sekedar embel-embel atau pemanis untuk pembelaan diri terhadap kegagalan penyelenggaraan pembangunan pertanian dan pedesaan. Suatu tanggapan yang lebih positif dari perancang kebijakan agar substansi masalah kelembagaan lebih terkuak, misalnya dalam bentuk "resep" dan prediksi ke depan yang lebih akurat, secara teoritis sangat ditunggu.

Penelitian kelembagaan, dengan basis pengetahuan sosiologi, hendaknya mulai dikembangkan lebih serius. Pilihan strategi yang digunakan dalam pembangunan pertanian itu sendiri sarat dengan aspek kelembagaan, misalnya dalam kaitannya dengan aspek tata-nilai, kepemimpinan, manajemen sosial dan interdependensi antara pelaku pembangunan pertanian dan pedesaan. Kebijakan pembangunan pertanian seyogyanya terbuka untuk dievaluasi (secara kritis) dari sudut kelembagaan, sehingga upaya untuk perumusan kebijaksanaan ke depan bisa lebih akurat dan berimplikasi besar bagi peningkatan daya saing masyarakat pertanian dan pedesaan.

Perspektif penelitian kelembagaan yang terkait dengan aspek pembangunan relatif luas. Oleh sebab itu tidaklah bijaksana jika wilayah penelitian kelembagaan pertanian secara parsial hanya dipusatkan untuk melihat sektor pertanian. Misalnya saja, penelitian kelembagaan adopsi teknologi produksi padi sawah hanya melihat peningkatan produksi padi secara agregat (nasional) dalam jangka pendek, tanpa melihat ketimpangan sosial yang ditimbulkannya, hal itu akan memberikan gambaran yang tidak lengkap. Dengan analisis kelembagaan bisa dibuka ruang analisa lebih

lebar dan lebih tajam untuk menjelaskan keberhasilan, kegagalan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, termasuk juga kaitannya dengan pembangunan nasional secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, E. 1933. *The Division of Labor in Society*. Free Press. New York.
- Durkheim, E. 1966. *The Rule of Sociological Method*. The Free Press. London.
- Geertz, C. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bratara Karya Aksara. Jakarta.
- Inayatullah. 1979. *Conceptual Framework for Country Studies of Rural Development*. In *Approach to Rural Development: Some Asian Experiences* (edited by Inayatullah. Asian and Pacific Development Administration Center. Kualalumpur.
- Kartodirdjo, S. 1984. *Ratu Adil*. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.
- Khaldun, I. 1976. *Filsafat Islam Tentang Sejarah: Pilihan dari Muqadimah* (Penerjemah C. Issawi). Penerbit Tintamas. Jakarta.
- Koschmann, J.V. 1995. *Kata Pengantar: Pemerintah Lunak dan Protes Unjuk Rasa. dalam Individu dan Kekuasaan* (Kono Usamu dkk.). P.T. Grasindo. Jakarta.
- Kotter, H. 1988. *Sasaran dan Strategi Pembangunan Pertanian di Dunia Ketiga. dalam Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian* (Penyunting Karl-Heinz W. Bechtold). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Lauer, R. H. 1982. *Perpectives on Social Change*. Allyn and Bacon, Inc. Boston.
- Maclver, R.M. and C.H. Page. 1962. *Society: an Introduction Analysis*. MacMillan & Co. Ltd. London.
- McKenzie, R.B. and G. Tullock. 1978. *Modern Political Economy: an Introduction to Economics*. McGraw-Hill Kogakusha, Ltd. Tokyo.
- Merton, R.K. 1962. *Social Theory and Social Structure*. The Free Press of Glencoe. New York.
- Polanyi, K. 1957. *The Great Transformation: the Political and Economics Origins of Our Time*. Beacon Press. Boston.
- Pranadji, T. 2002. *Reformasi Kesosio-budayaan Ekonomi Pedesaan yang Tertunda di Era Otonomi Daerah*. Seminar Nasional dan Rekonsiliasi Mahasiswa Pertanian se-Indonesia bertema *Studi Kritis Pembangunan Pertanian dalam Dua Tahun Otonomi Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat Petani di Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 2 Mei 2002*. Yogyakarta.
- Rahardjo, M.D. 1990. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rivers, W.H.R. 1926. *Social Organization* (edited by W.J. Perry). Kegan Paul, Trendh, Traber and Co. Ltd. New York.
- Rostow, W.W. 1960. *The Stages of Economics Growth*. Cambridge University Press. London.
- Sajogyo. 1974. *Modernization Without Development in Rural Java. (A Paper Contributed to the Study on Changes in Agrarian Structure, FAO of UN, 1972-1973)*. Bogor Agricultural University. Bogor.
- Steward, J.H. 1961. *Theory of Cultural Change: the Methodology of Multi-linear Evolution*. University of Illinois Press. Urbana.
- Thsijse, J.P. 1982. *Apakah Jawa Akan Menjadi Padang Pasir? dalam Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai* (Penyunting: Sajoyo). Penerbit C.V. Rajawali. Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1977. *The Organization Phenomenon and Planned Development in Rural Communities of Java: a Case Study of Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java*. University of Indonesia. Jakarta. (Disertasi).
- Uphoff, N. 1986. *Local Institutional Development: an Analytical Sourcebook with Cases*. Kumarian Press. Connecticut.
- Wertheim, W.F. 1974. *Evolution and Revolution: the Rising Wafe of Emancipation*. Penguin Books. Middlesex.